

**ANALISA TINGKAT EFISIENSI KEMITRAAN USAHA
DI KOTA PAYAKUMBUH**

TESIS

Oleh :

R. R. ARIANI
93206014



**PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS ANDALAS PADANG**

2001

ANALISA TINGKAT EFISIENSI KEMITRAAN USAHA DI KOTA PAYAKUMBUH

Oleh : R. R. Ariani
(Di bawah bimbingan Firwan Tan dan Fasbir Noor Sidin)

RINGKASAN

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan program pembinaan koperasi dan pengusaha kecil oleh BUMN secara efisien, efektif dan merata, perlu didorong upaya pelaksanaan hubungan kemitraan dan keterkaitan usaha antara BUMN pembina dan mitra binaan yang lebih harmonis, serasi dan berkesinambungan.

Hubungan kemitraan antara usaha industri kecil dan menengah dengan industri besar tidak hanya meningkatkan kualitas tapi juga efisiensi dan efektifitas produksi. Tapi kemitraan itu tidak dapat direalisasikan berdasarkan imbauan dan belas kasihan. Kemitraan yang efektif dan efisien akan timbul jika ada saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi dampak pola kemitraan usaha yang terdapat di kota Payakumbuh, seberapa jauh efisiensinya terhadap usaha industri kecil tersebut. menentukan pola kemitraan yang lebih efisien terutama antara usaha besar dan usaha kecil, usaha kecil dan usaha kecil.

Penelitian ini dilakukan kepada BUMN Pembina (PT. Semen Padang, PT. Posindo dan PT. Jamsostek) serta mitra binaan yang terdapat di kota

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan pada hakekatnya adalah suatu proses perubahan dari suatu keadaan tertentu kepada suatu keadaan yang lebih baik. Pada dasarnya tujuan pembangunan adalah untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka mengembangkan perekonomian rakyat kelompok usaha kecil merupakan kelompok yang amat penting karena menyangkut kelangsungan hidup orang banyak terutama di daerah pedesaan (Deperindag, 1996).

Salah satu upaya penanggulangan kemiskinan yang bertumpu kepada peran serta aktif dan produktifitas masyarakat, diusahakan untuk menumbuhkan kemandirian penduduk miskin. Diyakini bahwa masyarakat miskin mampu merumuskan kebutuhan mereka yang mendesak dan mendasar (Mubyarto 1998), hal yang perlu dilakukan dengan berbagai program yang dicanangkan justru bagaimana agar sikap kemandirian dan pemberdayaan masyarakat tersebut bisa diciptakan.

Sesuai dengan Pasal 18 Undang-Undang dasar 1945 dan semangat reformasi yang tengah berkembang, Pemerintah Indonesia dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat telah menetapkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974. Undang-undang ini merupakan dasar bagi upaya nyata pemerintah untuk melaksanakan otonomi daerah.

Keberhasilan pelaksanaan otonomi Daerah sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 akan sangat tergantung pada kemampuan keuangan yang dimiliki masing-masing daerah. Kenyataan menunjukkan bahwa kemampuan Pendapatan Asli Daerah (PAD) kabupaten dan kota sangat bervariasi tergantung pada potensi yang dimiliki. Oleh sebab itu perlu adanya usaha pemerintah untuk menggali sumber PAD yang ada di daerah dengan jalan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.

Salah satu kebijaksanaan pemerintah adalah mengembangkan usaha industri kecil yang ada di daerah. Seperti meningkatkan kemampuan industri kecil dan menengah sungguh merupakan suatu kebijaksanaan yang tepat, karena baik pada negara maju maupun pada negara berkembang, pengembangan usaha industri kecil seringkali menjadi titik perhatian (Depkop, 1996).

Pentingnya peran usaha industri kecil ini di dalam proses pembangunan negara yang sedang berkembang, terutama negara dengan kondisi seperti Indonesia yang jumlah tenaga kerja berpendidikan rendah dan sumber-sumber alam yang berlimpah, kapital terbatas, ekonomi perdesaan yang masih terkebelakang dan distribusi pendapatan yang tidak merata, sangat erat hubungannya dengan karakteristik usaha industri kecil tersebut (Tulus, 1993).

1. Dibanding dengan sektor usaha industri lainnya, usaha industri kecil lebih padat karya, sehingga pengembangan usaha industri kecil merupakan wahana yang baik bagi upaya pemerataan pendapatan mengingat jumlahnya yang besar dan tersebar di seluruh Indonesia.

BAB VII PENUTUP

7.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan penyajian data serta pembahasan bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan :

Untuk meningkatkan program pembinaan Koperasi dan Pengusaha Industri Kecil oleh BUMN perlu pelaksanaan kemitraan usaha yang berkelanjutan. Sedangkan kemitraan yang efisien akan timbul jika ada saling menguntungkan bagi kedua belah pihak antara BUMN dan Pengusaha UIK.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi dampak pola kemitraan usaha yang terdapat dikota Payakumbuh. Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat diambil kesimpulan bahwa pengusaha UIK masih membutuhkan modal, pengembangan teknologi dalam pengolahan produksi, bantuan pengembangan pemasaran produk dan promosi. Sedangkan dalam pembinaan SDM masih membutuhkan pembinaan manajemen dan administrasi karena faktor-faktor tersebut dapat meningkatkan penjualan dan laba perusahaan. Bagi usaha besar supaya dapat memberikan bantuan produk dengan disertai adanya keterkaitan hubungan bisnis supaya adanya saling keterkaitan antara usaha besar dengan usaha kecil.

Sedangkan pola kemitraan yang telah berjalan belum efisien bagi kedua belah pihak antara BUMN dan pengusaha UIK karena belum menguntungkan bagi kedua belah pihak. Agar kemitraan usaha ini dapat berkelanjutan untuk itu

DAFTAR PUSTAKA

- Tuwu, Alimudin. 1993. Pengantar Metode Penelitian, Universitas Indonesia
- Swasta Basu, DH. 1980. Azas-Azas Marketing, Akademi Keuangan dan Bank, Yogyakarta.
- Biro Pusat Statistik. 1997. Laporan Tahunan Industri Kecil, BPS Padang.
- Burroughs, GER : Design and Analysis in Educational Research, Great Britain, Alden Press, Oxford, 1975.
- Departemen Koperasi, dan Pengusaha Kecil dan Menengah Sumatera Barat, 1998
Peluang Usaha Bagi Pengusaha Kecil Menengah dan Koperasi
- Dipta, Twayan, Dkk. 1997. Pengembangan Pola Keterkaitan Antara Usaha Kecil/ Menengah dengan Usaha Besar dalam Rangka Kerjasama APEL, Badan Penelitian dan Pengembangan Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil.
- Said, E. Gumbira. 1996. Strategi Litbang Dalam Kemitraan Bisnis. Jurnal Manajemen Usahawan Indonesia. edisi September. Jakarta, penerbit FEUI.
- Aristanto, Eko. 1996. Pemberdayaan Usaha Kecil Melalui Model Kemitraan Usaha di Indonesia. Jurnal Science No. 35, Malang. UNMER.
- Handerson & Quandt. 1980. Micro Economic Theory A Mathematical. Approach International Standart Mic Grow-Hill Kogakhusa.
- Hasibuan, Nurimansyah. 1993. Ekonomi Industri : Persaingan, Monopoli dan Regulasi. Jakarta. LP3ES.
- Kartasasmita, Ginanjar. 1998. Pengembangan Kemitraan Usaha dengan Tinjauan Khusus Mengenai Peran Birokrasi Dalam Pembaharuan Administrasi dalam Menghadapi Era Globalisasi. Jakarta : Pimpinan Pusat Perhimpunan Sarjana Administrasi.
- Kinsey. 1984. *Metode research*. MC.Graw Hill. Singapore. edition 3.
- Komarudin, 1981. Analisa Organisasi Manajemen (terjemahan oleh Moh Masud) Jakarta. Erlangga.
- Linton, Lan. 1997. Kemitraan (Partnership for Profit), Alih Bahasa : Sularno Ciptowardoyo.